

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Sebuah keluarga yang baru terbentuk setelah perkawinan adalah untuk segera mempunyai momongan atau anak, kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga sangat diharapkan oleh pasangan suami istri. Ada sebuah keluarga yang sudah menikah selama puluhan tahun belum mempunyai anak, ada juga yang baru beberapa tahun menikah juga belum mempunyai anak, dalam hal ini jika suami istri yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak, maka terasa ada yang kurang atau keluarga tersebut dapat dikatakan belum lengkap.

Keinginan untuk mempunyai anak merupakan hal yang wajar bagi pasangan suami istri yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak merupakan hal yang sangat wajar, sebab sejalan dengan bawaan kodrat manusia, bahwa anak merupakan bagian dari darah daging orang tua yang nantinya akan mewarisi sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya.<sup>1</sup>

Dalam Agama Islam tidak melarang praktik pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya. Larangan pengangkatan anak apabila berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk

---

<sup>1</sup> Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 1.

dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan sebagai anak kandung didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat *Al-Ahzab* (33) ayat 4 dan 5. Surat *Al-Ahzab* ayat 4 artinya “Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja”. Surat *Al-Ahzab* ayat 5 artinya “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.<sup>2</sup>

Secara umum tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan, selain itu juga diharapkan anak dapat menjadi ahli waris yang akan mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Mengangkat anak untuk dijadikan anak angkat adalah jalah keluar bagi pasangan suami istri yang telah lama menikah, namun bagi pasangan yang mengadopsi anak harus memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak serta merawat seperti anak kandungnya sendiri.

Pada umumnya pasangan suami istri yang mengangkat anak dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun, yang terjadi pada pasangan suami istri yang akan mengangkat anak masih menganut hukum sistem adat yang hidup dan berkembang di daerah

---

<sup>2</sup> Lina Tiara Sari, *Penetapan Pengadilan Atas Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya di Kabupaten Kudus*, Skripsi, Universitas Muria Kudus, Kudus, 2017, hlm. 3.

setempat.<sup>3</sup> Dalam pengangkatan anak ditiap-tiap daerah di Indonesia mekanisme atau caranya berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya, hal ini tidak lepas karena Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan kearifan lokal yang berbeda-beda pula.<sup>4</sup>

Secara umum anak angkat menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA) adalah :

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan pengangkatan anak guna untuk mendapatkan kepastian hukum dalam keluarga baru bagi anak angkat adalah Pengadilan Negeri. Hal ini dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur tentang pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Agama (khususnya bagi yang beragama Islam). Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal mengadili bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur Pasal 49 angka 1 UUPA, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>3</sup> Noor Ipansyah Jastan dan Indah Ramadhansyah, *Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.76-78

<sup>4</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 12

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Pasal 50 UUPA menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pengangkatan anak memberikan status hukum, akibat hukum, dan tanggung jawab bagi orang tua angkat dan anak angkat oleh karena itu, peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat memerlukan kepastian hukum. Hal penting yang harus digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan agar peristiwa pengangkatan anak memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Pasal 50 Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara



pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak hanyalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan asal usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut berarti kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Kenyataannya dalam praktik masih ada orang Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, yang memang notabene sudah menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut karena menimbulkan permasalahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam mungkin dapat menimbulkan opsi bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak atau mungkin akan timbul sengketa kewenangan. Oleh karena itu, perlu kejelasan berkaitan dengan kewenangan, substansi hukum yang merupakan dasar kewenangan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta segala akibat hukumnya tersebut.

Pengadilan yang berwenang menegsahkan pengangkatan anak di Indonesia yaitu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan di angkat. hal ini ditegaskan dalam butir IV Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tetang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979. Pengadilan Negeri merupakan badan pengadilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter-country adoption*, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Tetapi dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga peradilan agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya khusus untuk mereka yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dapat mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan di angkat. Bahwa dalam hal permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri baik bagi yang beragama Islam dan non Islam ada akibat hukumnya bagi orang tua angkat dan orang tua kandung anak. Permohonan penetapan pengangkatan anak baik bagi orang Islam dan non Islam di lakukan di

Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan didalam UUPA tidak mengatur mengenai kewenangan penetapan permohonan penetapan anak. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana di atur Pasal 49 UUPA tidak mengatur kewenangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme atau prosedur penetapan permohonan pengesahan pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Mengapa orang yang beragama Islam Mengajukan Permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri?
3. Akibat hukum apa yang muncul dalam pengesahan penetapan anak angkat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme atau prosedur penetapan permohonan pengesahan pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui alasan orang yang beragama Islam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang muncul dalam pengesahan penetapan anak angkat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan yang hendak di capai yaitu sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini nantinya mampu memberi sumbangan pemikiran pada ilmu hukum, khususnya hukum perdata khususnya mengenai penetapan terhadap permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak yang berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum. Bagi masyarakat penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat kudus mengenai pengangkatan dan pengesahan anak di Pengadilan Negeri Kudus.